

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perkembangan teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing setiap negara juga menuntut daya saing setiap daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan mampu tercapai, melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya UU. No. 22/1999 yang diperbarui dengan UU. No. 32/2004 tentang pemerintah daerah dan UU. No. 25/1999 yang diperbarui dengan UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum pemerintahan daerah mengenai desain dan sistem atau pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang terkait dengan regulasi keuangan negara (Egit Gunadi, 2017).

Mewujudkan *good governance* merupakan mimpi besar bagi Bangsa Indonesia. Jika dilihat dari sektor akuntansi publik, terdapat beberapa permasalahan mengapa *good governance* masih jauh dari kenyataan di pemerintahan Indonesia saat ini. Salah satunya adalah belum sempurnanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik dan dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Belum sempurnanya sistem akuntansi yang handal menyebabkan kurangnya pengendalian internal pemerintah daerah. Hal tersebut dialami hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dalam

mewujudkan *good governance* di Indonesia untuk menyempurnakan sistem akuntansi pemerintahan daerah maka salah satunya dengan menerapkan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Maka Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah memfasilitasi pemerintah daerah dengan aplikasi SIMDA dengan harapan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan (Egit Gunadi, 2017).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik tingkat pelaporan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SIMDA diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD (www.bpkp.go.id).

Pengelolaan keuangan daerah sangat dituntut untuk selalu tertib dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan daerah (LKPD). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa laporan keuangan.

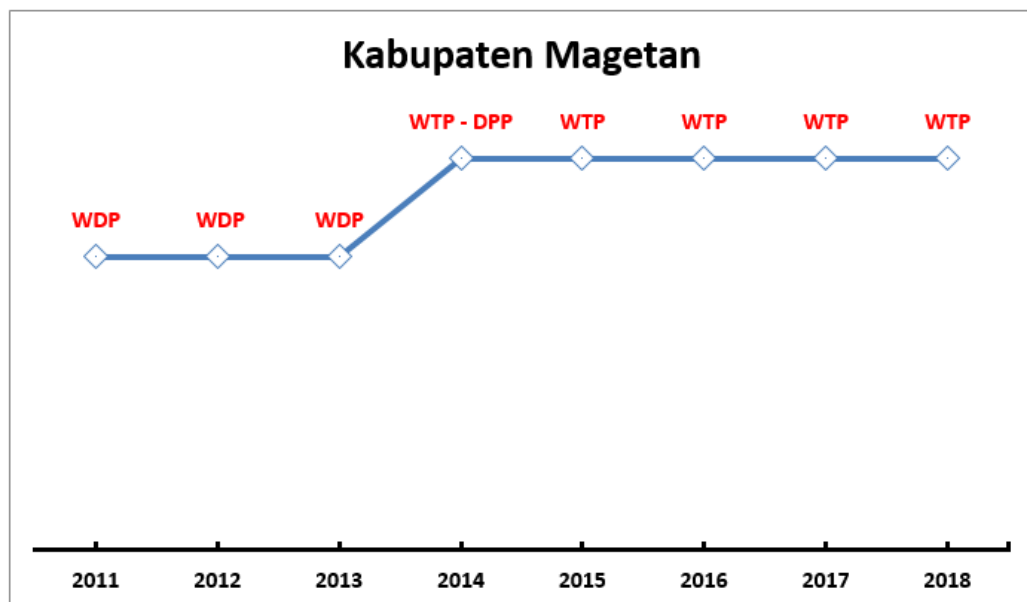
Laporan keuangan daerah merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah atas kegiatan keuangan pada periode tertentu dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu pemerintahan yang dapat dipercaya serta menunjukkan posisi keuangan. Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan daerah organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah harus lebih berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang banyak dari informasi tersebut dibutuhkan oleh berbagai pihak diluar maupun didalam pemerintahan. Laporan keuangan juga merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik (Roviyantie, 2010). Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah karakteristik kualitatif laporan keuangan antara lain : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintahan daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintahan Nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam menentukan atau membuat keputusan akan mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam pembuatan laporan keuangan juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam pembuatan laporan keuangan. Karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi/perusahaan disamping faktor lain. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dinas daerah sebagai organisasi pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Pegawai penatausahaan keuangan pada dinas-dinas di daerah harus mengerti dan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan metode akuntansi pemerintahan yang berlaku. Sumber daya manusia juga harus menguasai teknologi informasi (TI) demi mencapai tujuan organisasi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam memahami menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Nurillah, 2014, h. 9). Sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan.

Pencatatan transaksi yang tidak akurat bahkan transaksi yang tidak dicatat hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib ini merupakan kelemahan-kelemahan dalam suatu sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Magetan sebagai berikut :



<https://surabaya.bpk.go.id>

Gambar 1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Magetan

Berdasarkan gambar diatas, pada tahun 2011 sampai 2013 LKPD Kabupaten Magetan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), kemudian pada tahun 2014 BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), kemudian pada tahun 2015 sampai 2018 BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) didukung dengan kompetensi sumber

daya manusia akan meningkatkan sistem pengelolaan laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas. Kesimpulannya bahwa laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Magetan menunjukkan kenaikan opini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Menurut Bu Suci Sulastris, S. H selaku Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan (BPPKAD) Tahun 2019 “hal ini dapat menggambarkan bahwa adanya perbaikan sistem pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah dan juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan dilaksanakannya pelatihan setiap ada pembaruan database dari sistem pengelolaan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Namun demikian, masih terdapat salah satu penyebab terjadinya perangkapan tugas dan ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur dalam proses pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi SIMDA”.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Pratiwi (2018) menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Egit Gunadi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Berdasarkan fenomena dan penelitian diatas, maka peneliti mengkaji lebih dalam apakah pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan mengambil salah satu variabel dari kedua penelitian di atas, variabel yang diambil adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan kompetensi sumber daya manusia. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menggabungkan dua variabel dari kedua penelitian di atas dan penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magetan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan”**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ?
3. Apakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.3.1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan.

2. Mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan.
3. Mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi baru untuk univeristas khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeperbaiki kinerja pemerintahan daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Magetan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan komptensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.